
Pandangan Akuntansi Sektor Publik Terkait Akuntabilitas Pasca Bencana di Nusa Tenggara Barat

Ika Putri Fitri Ajiani¹, Ikang Murapi^{2*}, Khairunisa³, Rina Komala⁴

Universitas Bumigora

Jl. Ismail Marzuki, Mataram

ika.putri@universitasbumigora.ac.id, ikangmurapi11@universitasbumigora.ac.id,

nisa@universitasbumigora.ac.id, rina.komala@universitasbumigora.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima: 10/08/2022, Direvisi: 12/07/2022¹, 15/08/2022², Disetujui: 28/08/2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan *framework* yang dapat digunakan sebagai pedoman akuntabilitas pasca bencana di Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian membuat kerangka mengenai akuntabilitas pasca bencana yang tidak hanya memperhatikan data-data kuantitatif berupa angka, namun juga memasukkan unsur moral. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat terhindar dari tindak korupsi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pasca Bencana, Nusa Tenggara Barat

Abstract

This study aims to provide a framework idea that can be used as a guideline for post-disaster accountability in West Nusa Tenggara. The type of research used is descriptive qualitative research. The results show that the research creates a framework for post-disaster accountability that does not only pay attention to quantitative data in the form of numbers, but also incorporates moral elements. This research is expected to be an input for the government in order to avoid corruption.

Keywords: *Accountability, Post-Disaster, West Nusa Tenggara*



Pendahuluan

Akuntabilitas memiliki peran dalam membangun dan memelihara kepercayaan, dan berpotensi menjadi sesuatu yang kritis (Brody, 2002:472). Dalam lingkup pemerintahan, akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas dana yang telah digunakan untuk aktivitas pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Masalah yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya yaitu bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada beberapa kasus masih saja ada tindak korupsi bahkan pada saat penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dalam ketentuan umum Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana (PPRI, 2008). Saat ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat sudah pada tahap pascabencana. Belum lama ini, seorang anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muhir ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi. Perkara ini diduga melibatkan sejumlah pihak karena berkaitan dengan pengesahan anggaran untuk Pemkot Mataram. Muhir diduga meminta "balas jasa" dari pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor. Ia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp4,2 miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk dalam APBD Perubahan tahun 2018.



Kejaksanaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya. Kepala Dinas Pendidikan Mataram, Sudenom, dan seorang kontraktor berinisial CT, turut ditangkap bersama Muhir (www.bbc.com). Kasus ini merupakan satu dari beberapa kasus penyelewengan dana anggaran lainnya yang terjadi pada tahap pasca bencana di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kasus seperti ini lah yang menyebabkan laporan pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang dinilai *akuntable*. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai Negara juga pernah mengalami hal yang sama ketika ada beberapa oknum yang memanfaatkan celah dari penderitaan masyarakat banyak akibat bencana alam. Seperti “*Black Saturday*” yang terjadi di Australia pada tahun 2009 diteliti oleh Taylor, et al. (2014) menemukan bahwa interaksi akuntabilitas ke bawah tidak duduk pada tempatnya atau bisa dikatakan tidak sesuai secara konseptual, dalam kerangka tipologi akuntabilitas yang berorientasi pada pemangku kepentingan.

Peristiwa badai Katrina yang terjadi di New Orleans telah diteliti oleh Baker (2014) yang menemukan bahwa adanya kerusakan akuntabilitas karena kurangnya aspek moral pemerintah dalam merespon korban akibat badai Katrina. Sciulli (2018) menambahkan pada penelitiannya tentang peristiwa banjir berganda di Australia bahwa tata kelola yang berbelit-belit dan pengaturan pendanaan Pemerintah Negara dan Federal yang luas menghasilkan kebingungan di antara dewan lokal dan masyarakat mengenai kelayakan mereka untuk mendapatkan dukungan keuangan.

Penelitian lainnya yang juga membahas akuntabilitas pasca bencana yaitu seperti Sargiacomo, et al. (2014), Perkiss & Moerman (2017), Sargiacomo (2015), Atkins, et al. (2015), Lai, et al. (2014), dan lain sebagainya. Beberapa penelitian memberikan sisi positif dari akuntabilitas pasca bencana yang berjalan baik seperti timbulnya bentuk akuntabilitas baru di Utopia yaitu dengan “monetisasi” biaya perubahan iklim untuk mendorong pemikiran yang terintegrasi dan model bisnis yang berkelanjutan. Namun, masih banyak juga diantara penelitian ini yang menilai buruk akuntabilitas di berbagai macam peristiwa seperti bagaimana aktor



akuntansi secara bersamaan melayani beberapa master etis dan bagaimana salah satunya dapat mendominasi “ekonomi moral” akuntansi.

Selain itu juga ada yang membahas konflik yang terlihat dari bencana dan memobilisasi rekening-rekening yang terabaikan atau tersembunyi dari apa artinya mencapai kebaikan bersama, dalam konteks negatif. Aspek moral beberapa kali dibahas pada penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pasca bencana. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam situasi darurat tertentu, seseorang akan dihadapkan pada dilema akan bagaimana membuat keputusan moral melalui penalaran moralnya (Giligan, 1993). Pendapat Gilligan mengenai moral itu sendiri sudah tidak lagi berfokus pada keadilan, tetapi ia menyebut *moral is a cure* yang artinya konsep moral lebih ditekankan pada kepedulian seseorang.

Bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sendiri juga banyak menerima bantuan moral dari berbagai dinas pemerintahan. Namun, status bencana yang terjadi masih belum dikatakan sebagai bencana Nasional karena dikhawatirkan akan mengurangi pengunjung pariwisata mengingat salah satu pendapatan terbesar di Nusa Tenggara Barat berasal dari bidang pariwisata. Selain itu juga ditakutkan adanya budaya-budaya yang tidak sejalan dengan apa yang dianut oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Seperti adanya indikasi kristenisasi melalui bantuan buku-buku bacaan kepada anak-anak korban bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu (www.kompas.com).

Hal-hal semacam ini lah yang ditakutkan jika status bencana ditingkatkan menjadi bencana Nasional. Hal semacam ini pernah diteliti oleh Field (2017) yang mengambil *setting* bencana Topan Yolanda. Ia mengungkapkan bahwa perlunya pendekatan yang lebih terlokalisasi, kontekstual, dan peka budaya untuk memahami kebutuhan dan kerentanan bencana. Sehingga meskipun konsep moral diartikan sebagai tingkat kepedulian seseorang yang dapat mempengaruhi keputusan moral seseorang, tetapi harus diperhatikan juga tujuan dari keputusan moral tersebut apakah memberikan manfaat bagi korban bencana atau malah mengambil keuntungan dari keputusan yang dibuat sendiri. Selain masyarakat luas yang menjadi korban bencana alam, beberapa perusahaan juga ikut menerima imbas dari bencana itu sendiri.

Kerugian seperti runtuhnya gedung-gedung dan rusaknya barang persediaan merupakan hal yang ditanggung oleh perusahaannya. Comyns & Franklin (2018) menyampaikan



dalam penelitiannya yang berfokus pada runtuhnya gedung Rana Plaza bahwa ada perbedaan perilaku antara perusahaan dalam pengaturan kelompok dibandingkan dengan ketika dihadapkan dengan krisis secara individual. Paik, et al. (2017) membahas mengenai bagaimana perusahaan dihadapkan pada komitmen tanggung jawab social perusahaan (CSR) ketika terjadi tragedi Bangladesh. Penelitian lainnya terkait dampak bencana terhadap kerugian perusahaan yaitu dilakukan oleh Galbusera & Giannopoulos (2018), Mohan, et al. (2018), Amernic & Craig (2017), dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini ada yang menyarankan untuk menggunakan relevansi model I/O, ada juga menjelaskan dampak bencana terhadap PDB, kemudian bagaimana pentingnya hubungan bahasa kepemimpinan dan budaya keselamatan kerja.

Banyaknya hal yang timbul akibat dari suatu bencana alam yang tidak dapat diduga kerugian apa saja yang ditimbulkan membuat peluang bagi peneliti untuk menelusuri lebih dalam lagi sisa-sisa kejadian pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dari sisi akuntabilitas publik dengan mempertimbangkan aspek moral. Hal ini lah yang membuat penelitian di bidang akuntabilitas publik pasca bencana menjadi istimewa karena dapat mengangkat aspek moral pihak-pihak yang dengan sukarela memberikan bantuan kepada korban bencana dan pihak-pihak yang justru memanfaatkan peristiwa bencana sebagai ladang memperkaya diri.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan tentang akuntabilitas pasca bencana yang dilihat dari sisi nilai moral.

Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas

Bovens (2007:452) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara seorang aktor dan sebuah forum di mana aktor berkewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya dan forum dapat mengajukan pertanyaan melewati penilaian yang memungkinkan aktor menghadapi konsekuensi atas apa yang sudah dilaksanakan. Akuntabilitas memiliki peran dalam membangun dan memelihara kepercayaan, dan berpotensi menjadi sesuatu yang kritis.



Hal ini terutama terjadi dalam konteks di mana telah diperdebatkan bahwa: 'sektor nirlaba yang ada untuk kepentingan publik tidak lagi diambil pada keyakinan, tetapi lebih kepada akuntabilitas sektor nirlaba' (Brody, 2002:472).

Dalam lingkup pemerintahan, akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas dana yang telah digunakan untuk aktivitas pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Teori Perkembangan Moral

Menurut Kohlberg yang disebut dengan moral adalah bagian dari penalaran (*reasoning*) sehingga ia pun menamakannya dengan penalaran moral (*moral reasoning*). Penalaran atau pertimbangan tersebut berkenaan dengan keluasaan wawasan mengenai relasi antara diri dan orang lain, hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Kohlberg mendefinisikan moral sebagai struktur keadilan, dimana akhir dari semua tindakan moral, petunjuk dan sanksi harus menjamin keadilan bagi individu. Konsep moral sebagai *justice* berarti menekankan kondisi manusia seperti kesetaraan, kebebasan, timbal balik dan menghargai kehidupan. Kebenaran bagi semua orang bersifat universal. Moral dianggap prioritas yang melebihi berbagai kumpulan norma sosial, aturan atau konvensi (Kohlberg, 1958).

Teori Kohlberg mendapat kritikan dari Gilligan, yang pernah menjadi asisten Kohlberg. Kritiknya terhadap teori Kohlberg adalah bahwa teori Kohlberg tidak memadai untuk menggambarkan moral dari perempuan. Gilligan memulai studi dan mempertanyakan kembali tentang perkembangan moral pada perempuan. Gilligan menemukan bahwa perempuan lebih menekankan aspek relasi (hubungan) dibandingkan laki-laki. Pada laki-laki, definisi moral ada dalam istilah keadilan (*justice*), sedangkan perempuan, mendefinisikan moral bukan dalam



istilah, hak, namun lebih banyak pada istilah tanggung jawab (*responsibility*) dan kepedulian (*care*) (Gilligan, 1993). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat Gilligan mengenai moral itu sendiri sudah tidak lagi berfokus pada keadilan, tetapi ia menyebut *moral is a cure* yang artinya konsep moral lebih ditekankan pada kepedulian seseorang. Gilligan mengemukakan urutan perkembangan moral yang berorientasi kepedulian sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Perkembangan Moral

Tingkat 1	<i>Orientation of Individual Survival</i> (memfokuskan pada apa yang terbaik bagi dirinya)
Tingkat 2	<i>Goodness as Self Sacrifice</i> (memfokuskan konsekuensi tindakan pada kebutuhan orang lain)
Tingkat 3	<i>Morality of Nonviolence</i> (memfokuskan padaperintah/keputusan tentang apakah hal yang dilakukan membahayakan atau tidak membahayakan orang lain, termasuk diri sendiri).

Sumber: Gilligan (1993)

Individu yang berada pada tingkat pertama dianggap mempunyai tingkat kepedulian yang kurang, hal ini dapat dikaitkan dengan kasus anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muhir yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi. Jika dilihat dari sisi moralnya, jelastingkat kepedulian terhadap korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat sangat kurang atau bahkan tidak ada karena lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan menyelamatkan korban bencana dari kesusahan akses pendidikan.

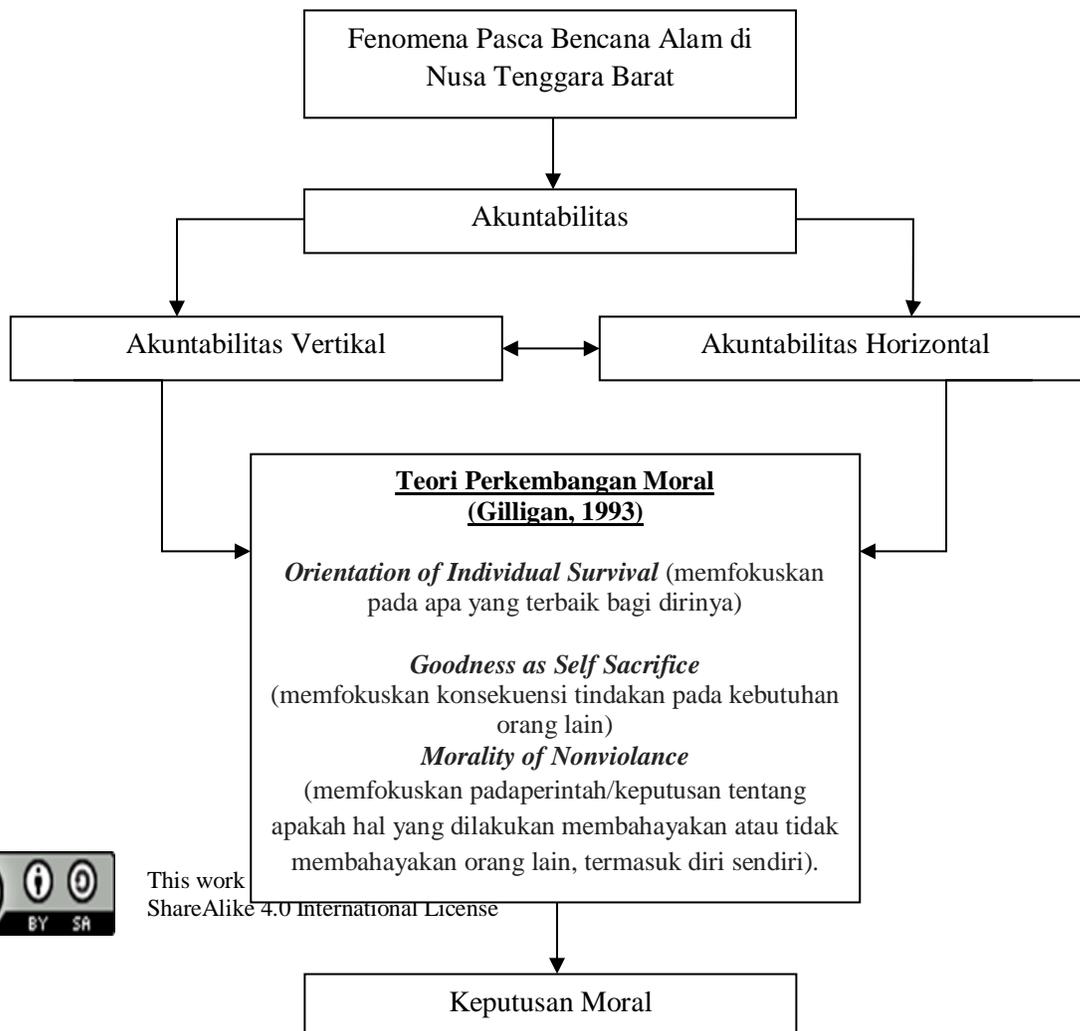
Pada tingkat kedua dianggap memiliki tingkat kepedulian yang baik dengan memfokuskan konsekuensi tindakan pada kebutuhan orang lain. Hal ini berkaitan dengan bencana alam di Nusa Tenggara Barat yang tidak hanya menerima bantuan dari dinas



penanggulangan bencana, tetapi juga dari berbagai dinas pemerintahan lainnya yang turut langsung memberikan sumbangan kepada korban bencana, seperti dinas ketahanan pangan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun bukan merupakan dinas yang berfokus pada penanggulangan bencana, tetapi karena adanya tingkat kepedulian yang tinggi menyebabkan dinas-dinas tersebut berinisiatif memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.

Pada tingkatan ketiga menurut Gilligan tidak mudah seorang individu untuk dapat mencapai tingkat kepedulian ini karena keputusan yang diambil adalah baik baginya dan bagi orang lain. Jika dikaitkan dengan akuntabilitas, maka hal ini berhubungan dengan selarasnya antara akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Artinya, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi harus sama bagusnya dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Gambar 1. Framework Akuntabilitas Pasca



Kesimpulan dan Saran

Dalam *framework* akuntabilitas pasca bencana yang dibuat oleh penulis, penulis memakai teori perkembangan moral sebagai dasar dan panduan untuk membuat kerangka kerja akuntabilitas pada tahap pasca bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berawal dari suatu fenomena dimana dalam tahap pasca bencana alam di Nusa Tenggara Barat terjadi penyelewengan dana bantuan. Meskipun tidak seluruh aparat pemerintah melakukan hal tersebut, tetapi hal ini perlu diteliti lebih lanjut lagi apakah dalam menyalurkan bantuan baik berupa uang atau barang seseorang dipengaruhi oleh tingkat moralnya.

Akuntabilitas dalam hal ini terkait dengan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan horizontal (*horizontal accountability*). Selain itu, terdapat 3 unsur yang terdapat dalam teori perkembangan moral, yaitu *orientation of individual survival*, *goodness as self sacrifice*, dan *morality of nonviolence*. 3 hal ini akan menjadi dasar untuk menentukan keputusan moral seseorang dalam mempertanggungjawabkan bantuan terkait penanggulangan bencana. Dengan adanya kerangka kerja di atas, diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah dalam mengevaluasi akuntabilitas pasca bencana, sehingga dapat meminimalisir terjadi tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

- Amernic, J., & Craig, R. (2017). CEO speeches and safety culture: British Petroleum before the Deepwater Horizon disaster. *Critical perspectives on accounting*, 47, 61-80.
- Atkins, J., Atkins, B. C., Thomson, I., & Maroun, W. (2015). "Good" news from nowhere: imagining utopian sustainable accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 651-670.
- Baker, C. R. (2014). Breakdowns of accountability in the face of natural disasters: The case of Hurricane Katrina. *Critical perspectives on accounting*, 25(7), 620-632.
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Analysis & Organisational Analysis: Element of The Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann Educational Books.
- Comyns, B., & Franklin-Johnson, E. (2018). Corporate reputation and collective crises: A theoretical development using the case of Rana Plaza. *Journal of Business Ethics*, 150(1), 159-183.



- Field, J. (2017). What is appropriate and relevant assistance after a disaster? Accounting for culture (s) in the response to Typhoon Haiyan/Yolanda. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 22, 335-344.
- Galbusera, L., & Giannopoulos, G. (2018). On input-output economic models in disaster impact assessment. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
- Gilligan, C. (1993). *In a different voice*. Harvard University Press.
- Kohlberg, L. (1958). *The development of modes of moral thinking and choice in the years 10 to 16*. University of Chicago.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lai, A., Leoni, G., & Stacchezzini, R. (2014). The socializing effects of accounting in flood recovery. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(7), 579-603.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mohan, P. S., Ouattara, B., & Strobl, E. (2018). Decomposing the Macroeconomic Effects of Natural Disasters: A National Income Accounting Perspective. *Ecological Economics*, 146, 1-9.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset*. ISBN 979-514-051-5.
- Paik, G. H., Lee, B., & Krumwiede, K. R. (2017). Corporate social responsibility performance and outsourcing: The case of the Bangladesh tragedy. *Journal of International Accounting Research*, 16(1), 59-79.
- Perkiss, S., & Moerman, L. (2017). Hurricane Katrina: Exploring justice and fairness as a sociology of common good (s). *Critical Perspectives on Accounting*.
- Petrescu, A. (2013). The transcendental-phenomenological perspective on intersubjectivity: Various aspects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 71, 14-20.
- Sargiacomo, M. (2015). Earthquakes, exceptional government and extraordinary accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 42, 67-89.
- Sargiacomo, M., Ianni, L., & Everett, J. (2014). Accounting for suffering: Calculative practices in the field of disaster relief. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(7), 652-669.
- Sciulli, N. (2018). Weathering the storm: Accountability implications for flood relief and recovery from a local government perspective. *Financial Accountability & Management*, 34(1), 30-44.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cetakan kesebelas*. Bandung : Alfabeta.
- Taylor, D., Tharapos, M., & Sidaway, S. (2014). Downward accountability for a natural disaster recovery effort: Evidence and issues from Australia's Black Saturday. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(7), 633-651.
- Vosslander, R. (2015). After the earth moved: Accounting and accountability for earthquake relief and recovery in early twentieth-century New Zealand. *Accounting History*, 20(4), 518-535.

www.bbc.com

www.kompas.com

